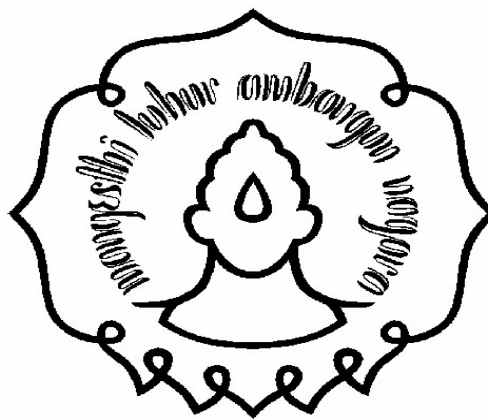


**Studi perbandingan hukum pengaturan kewenangan kejaksaan dalam
penuntutan perkara pidana
menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dan menurut
hukum acara pidana Jepang
(*Japan Criminal Procedure Code*)**



S K R I P S I

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

Taufiq Wibowo

E.1106184

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN
KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(KUHP) DAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA JEPANG
(*JAPAN CRIMINAL PROCEDURE CODE*)**

Disusun oleh :

TAUFIQ WIBOWO

E 1106184

Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing

BAMBANG SANTOSO S.H, M.Hum

NIP. 196202091989031001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN
KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(KUHAP) DAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA JEPANG
(*JAPAN CRIMINAL PROCEDURE CODE*)**

Disusun oleh :

TAUFIQ WIBOWO

E 1106184

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Juli 2010

TIM PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S. H., M.H :

Ketua

2. Kristiyadi, S.,H, M.Hum :

Sekretaris

3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum :

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum
NIP : 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Taufiq Wibowo

NIM : E 1106184

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA JEPANG (*JAPAN CRIMINAL PROCEDURE CODE*)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2010
yang membuat pernyataan

Taufiq Wibowo
NIM E1106184

MOTTO

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan ALLAH kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana ALLAH telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya ALLAH tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

(Q.S. AL QASHASH :77)

*“Pelajarilah ilmu
Barangsiapa mempelajarinya karena Allah, itu taqwa
Menuntutnya, itu ibadah
Mengulang-ulangnya, itu tasbih
Membahasnya, itu jihad
Mengajarkannya orang tidak tahu, itu sedekah
Memberikannya kepada ahlinya,
Itu mendekatkan diri kepada Tuhan”*
(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Abdil Barr, Ilya Al-Ghozali, 1986)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, karunia dan hidayahNya*
- 2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan penulis dalam mengarungi hidup ini*
- 3. Kedua Orangtua Ku tercina Bapak Maryadi dan ibu Asneli.*
- 4. KakakQ tercinta "Arie Kristanto"*
- 5. Seluruh keluarga besarku atas perhatian dan semangatnya*
- 6. Honey bunnyQ "Corry Ah Nurhuda".*
- 7. Sahabat-Sahabatku dimanapun berada*
- 8. Teman-temanQ angkatan 2006 FH UNS*
- 9. Almamterku, Universitas sebelas Maret Surakarta.*

ABSTRAK

TAUFIQ WIBOWO, E 1106184. 2010 **STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) DAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA JEPANG (*JAPAN CRIMINAL PROCEDURE CODE*)**. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Hukum Acara Pidana Jepang (*Japan Criminal Procedure Code*)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat diskriptif, Dengan cara membandingkan antara dua system hukum yang berbeda pada suatu Negara. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen, Tehnik analisa data yang digunakan penulis adalah tehnik analisa kualitatif dengan model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus.

Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) simpulan, yaitu pertama persamaan kewenangan kejaksaan di Indonesia dan di Jepang adalah melakukan penuntutan, sedangkan perbedaan kewenangan kejaksaan di Indonesia dan di Jepang adalah dalam kewenangan penyidikan perkara dari pertama sampai terakhir. Kedua, Kelebihan sistem penuntutan yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia menganut dua sistem yaitu, Mandatory Prosecutorial System dan Discretionary Prosecutorial System sedangkan di Jepang hanya menganut *Discretionary Prosecutorial System*, dan Kelemahan sistem penuntutan Kejaksaan Republik Indonesia adalah dalam hal Mandatory Prosecutorial System karena dalam sistem ini jaksa menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang diluar yang sudah ditentukan. Sedangkan Jepang jika semua orang melakukan tindak pidana dengan alasan tertentu yang dapat memaafkan tindakan tersebut maka sistem ini dapat dimanfaatkan sebagian orang tertentu untuk melakukan tindak pidana.

Kata kunci : Perbandingan Hukum, Penuntutan

ABSTRACT

TAUFIQ WIBOWO, E 1106184. 2010 **COMPARATIVE STUDY OF ATTORNEY REGULATION AUTHORITY IN CRIMINAL PROSECUTION CASES ACCORDING TO THE BOOK OF ACT CRIMINAL PROCEDURE LAW (KUHAP) AND JAPANESE CRIMINAL PROCEDURE LAW (*JAPAN CRIMINAL PROCEDURE CODE*)**. Sebelas Maret University Faculty of Law.

This study aims to find out the similarities, differences, advantages, and disadvantages of attorney regulation authority in the prosecution of criminal cases according to The Book of Act Criminal Procedure Law (KUHAP) and The Criminal Procedural Law of Japan (Japan Criminal Procedure Code).

This research is the study of descriptive normative law which performed by comparing between two different legal systems that exist in a country. The data types which used are secondary data. Secondary data sources that are used include the primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques which used are through the study of literature both in the form of books and documents. Data analysis techniques that used by the author are qualitative analysis techniques with an interactive model that is performed with an interaction, both in the components and the process of collecting data from the form of process cycles.

Based on the study, generated 2 (two) conclusions, first, the similarities between the prosecutor's authority in Indonesia and in Japan is in the conduct of the prosecution, while the difference in the prosecutor's authority in Indonesia and in Japan is within the authority of the first investigation of the case until last investigation. Second, the advantages of the prosecution system that adopted by the Attorney General of the Republic of Indonesia has two systems, they are Mandatory Prosecutorial System dan Discretionary Prosecutorial System while in Japan only adopted Discretionary Prosecutorial System. Then, the disadvantages of the prosecution system in the Attorney General of the Republic of Indonesia are in the point of Prosecutorial Mandatory System. In this system the prosecutor handling a case based only on the existing evidence and not on things that are beyond from the case. While in Japan if all the people committing crimes with a specific reason that can excuse such action so this system can be used by certain people to commit criminal acts.

Keywords: Comparative Law, Prosecution

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semata alam atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul **STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) DAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA JEPANG (*JAPAN CRIMINAL PROCEDURE CODE*)**

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mengalami banyak hambatan dan permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penyelesaian penulisan hukum ini. Namun atas bimbingan, bantuan moral maupun materiil, serta saran dari berbagai pihak yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan selalu mendukung penulis. Sehingga tidak ada salahnya dengan kerendahan hati dan perasaan yang tulus dari hati yang paling dalam, penulis memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Syamsulhadi, SpKj selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses belajar mengajar dan menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Bapak Lego Karjoko, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang selalu memberi nasehat dan bimbingan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H, MH selaku Ketua Bagian Hukum Acara. Yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan membrikan ilmu-ilmu tentang hukum acara pidana..
5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan tidak lelah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis, serta telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis yaitu menjadi Asisten Dosen mata kuliah PLKH Pidana
6. Bapak Kristiyadi, S.H, M.H, selaku dosen Hukum acara pidana yang telah memberikan dasar-dasar hukum acara pidana.
7. Bapak Harjono, S.H, M.H selaku ketua program non reguler Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala bimbingannya kepada seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Kedua Orangtua Ku Bapak Maryadi dan Ibu Asneli yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, jirih payahnya dalam bekerja untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan menyekolahkan penulis sampai saat ini. Papa, mama, ku takkan mengecewakanmu dan ku berjanji akan membahagiakan mu sampai akhir hayat.
11. Kakakku Arie Kristanto yang selalu membimbing ku dalam mengarungi hidup ini, trimakasih mas atas segala apa yang telah kau berikan sampai sekarang.

12. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil.
13. Honey bunnyQ “Corry Ah Nurhuda” yang selalu setia memberi semangat, menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta kasih sayangnya yang selalu setia kepada penulis,
14. Sohob-Sohob SMA ku Lukman, Alfi, Henry, Gama, Fiki, Yuda, Susi, Rani, Minar, Arum yang selalu membantu penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini dan sampai sekarang menemani keseharianku dengan candaawanya dan ide-idenya dalam menempuh hidup ini.
15. Teman-teman kuliah seperjuanganku Abi, Budi Aji, Jeffry, Anung, Rodhi, Bayu, Cahyadi, Gembong, Rinaldi, Galih, Diger, Kusumo, Ardhiar, Wisnu, Wahyu, Dina, Kumala, Etika, Deden, Ririn, Berlian, Nana, yang telah membantu selama kuliah, menyelesaikan skripsi dan mengisi hari-hari ku dengan candaawa baik dikampus maupun diluar kampus dan seluruh teman-teman Angkatan 2006 FH UNS yang tak dapat ku sebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari Penulis selama ini hingga lebih berwarna dan berarti.
16. Pasukan pengaman parkir FH UNS Pak Wardi, Mas Wahyono, Mas Didit, Mas Eko dan Mas Bimo yang selalu setia bercanda gurau dengan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum ini dan kedepannya akan Penulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat dalam kemajuan hokum di Indonesia dan bagi semua pihak. Amin.

Surakarta, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Hukum	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum.....	15
a. Pengertian Perbandingan Hukum.....	15
b. Perbandingan Hukum Sebagai Metode dan Ilmu.....	17
c. Perbandingan Hukum dan Cabang-Cabangnya.....	19
2. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	20
a. Pengertian Kejaksaan.....	20
b. Tugas dan Wewenang.....	20

3. Tinjauan umum Tentang Penuntutan.....	21
a. Pengertian Penuntutan.....	21
b. Tugas dan Wewenang Penuntutan Umum.....	22
4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana.....	23
a. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	23
b. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana.....	25
c. Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	28
5. Tinjauan Umum Tentang Criminal Procedure Code.....	31
a. Sejarah.....	31
b. Penuntutan.....	32
B. Kerangka Pemikiran.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana Menurut Kuhap Dengan Hukum Acara Pidana Jepang (Japan Criminal Procedure Code).....	36
B. Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan Sistem Penuntutan Dalam Penuntutan Perkara Pidana Menurut Kuhap Dengan Hukum Acara Pidana Jepang (Japan Criminal Procedure Code).....	66

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	72
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara memiliki lembaga yang bergerak dibidang penuntutan, seperti halnya di negara Amerika, Belanda, Perancis, Swedia, dan Jepang. Penuntutan di setiap negara memiliki posisi yang berbeda dalam kerangka negara. Kesamaannya adalah bahwa di setiap negara ada beberapa pejabat publik (sering kali menteri Kehakiman), yang bertanggung jawab di parlemen untuk performa layanan penuntutan. Pengaruh langsung yang lebih dari warga adalah ketika mereka diperbolehkan untuk memilih hakim dan jaksa, sistem ini yang dikenal di Amerika Serikat. Amerika Serikat (setidaknya di tingkat negara bagian). Efeknya adalah bahwa seorang jaksa harus mengambil kehendak publik diperhitungkan, jika ia ingin mempertahankan jabatannya (Openbaar Ministerie Speech A Prosecution Service must always be a Public Prosecution Service, 16 februari 2006).

Dalam praktek keberadaan sistem penuntutan dalam suatu negara tidak memiliki keseragaman, masing-masing negara memiliki model yang berbeda-beda. Pada negara-negara Eropa Kontinental keberadaan sistem penuntutan jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan (*Separation of powers*) melahirkan beberapa model (*type*), seperti:

1. Sistem penuntutan merupakan bagian kekuasaan esekutif, berada dibawah Mentri Kehakiman dan kepala pemerintahan. Model seperti ini disebut model perancis (*Prosecutions of Freanch type*). Selain diadopsi oleh negara Perancis juga dapat ditemukan pada negara anatara lain *Czech Republic*, *Netherlands* dan *Japan*.
2. Sistem penuntutan yang terpisah dan mandiri dari kekuasaan esekutif, bertanggungjawab kepada parlement. Model seperti ini dapat ditemukan pada negara antara lain *Hungaria*, *Slovak Republic* dan *Macedonia*.

3. Sistem penuntutan tercakup dan memiliki hubungan dengan kekuasaan kehakiman (*judicial*). Model seperti ini dapat ditemukan pada negara, antara lain Italia dan Bulgaria.

Perlu ditekankan disini, bahwa semua model di atas hanya bersifat fungsional yakni berkaitan dengan masalah mencari jawaban yang mana dari tiga model penuntutan tersebut lebih memenuhi syarat terciptanya negara hukum yang demokratis. Berbeda dengan negara-negara Eropa Kontinental, beberapa negara-negara ex-komunis atau pada negara-negara pecahan Union of Soviet terdapat kecenderungan meletakkan lembaga pelaksana sistem penuntutan sebagai bagian kekuasaan kehakiman dan tidak berada dibawah kekuasaan pemerintah, sehingga sistem penuntutan menjadi bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman. Seperti dapat ditemukan pada negara Azerbaijan dan Georgia. Hal ini disebabkan ketika negara-negara tersebut menjadi bagian Union of Soviet lembaga pelaksana sistem penuntutan diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk membangun dan mendukung rejim totaliter, yang pada akhirnya menyebabkan adanya trauma politik.

Mengacu pada tugas dan kewenangan Kejaksaan di berbagai macam sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara, maka dapat dilihat Jaksa sangat berperan aktif dalam proses penyidikan hingga penuntutan sebagai berikut:

1. Sistem Anglo Saxon

Dalam sistem ini meski secara teoritis polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing, namun polisi yang melakukan penyelidikan perkara diwajibkan melaporkannya kepada jaksa sedini mungkin, serta memerlukan persetujuan jaksa untuk melakukan penuntutan tersebut. Sehingga dalam prakteknya, polisi harus mematuhi nasihat jaksa mengenai pengumpulan bukti-bukti tambahan dari awal agar perkara yang diselidikinya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Selain itu polisi juga harus mematuhi keputusan jaksa untuk menghentikan penyidikan karena penuntutannya akan dihentikan. Negara yang

menerapkan sistem ini adalah negara-negara persemakmuran bekas jajahan Inggris seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, Malaysia, dan Singapura.

2. Sistem Anglo American

Dalam sistem ini jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana karena jaksa memiliki pengaruh yang sangat besar dan berarti sekali terhadap tindakan pejabat peradilan pidana yang manapun. Selain itu, kewenangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut serta untuk menerima pengakuan tersangka agar memperoleh dakwaan yang lebih ringan (*plea guilty*) benar-benar sangat menentukan. Sedangkan di dalam perkara yang sangat berat seperti pembunuhan, jaksa memimpin penyelidikan baik secara perseorangan atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian tindak pidana. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat.

3. Sistem Eropa Kontinental

Dalam sistem ini jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan polisi memiliki kemampuan yang handal dalam proses pengumpulan bukti-bukti di tempat kejahatan, akan tetapi tetap saja tergantung pada nasihat dan pengarahan jaksa. Hal ini disebabkan karena jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Bahkan di negara-negara yang menganut sistem ini, dimana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan penuntutan yang luas untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana. Contoh negara-negara yang menerapkan sistem ini beserta variasinya adalah Jerman, Portugal, Spanyol, Belanda, Perancis, Jepang dan beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental.

Di Indonesia kedudukan Kejaksaan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan hanya diatur di dalam undang-undang. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan Kekuasaan Mahakmah Agung dan Kejaksaan Agung, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk : Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran, Menuntut Perkara, Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal., Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Setelah Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Jaksa memahami bahwa sebagai “kuasa hukum (*legal representative*)” dari kepolisian dan untuk menjelaskan pendapat-pendapat pihak kepolisian dihadapan pengadilan atau Jaksa dapat pula mengambil peran sebagai “konsultan hukum (*Domestik legar adviser*)” yang memberikan nasehat hukum kepada polisi bagaimana melaksanakan prosedur-prosedur hukum. Di lain sisi, Jaksa menganggap dirinya sebagai pihak yang utama dalam “mewakili pengadilan” dalam melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum.

Mengacu pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu : Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat, Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan di Jepang memiliki status yang seimbang dengan korps hakim di pengadilan. Independensi keduanya dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing dijamin oleh hukum. Namun demikian, masalah kemandirian kejaksaan di Jepang untuk melaksanakan fungsi penuntutan agar tidak diintervensi oleh lembaga manapun, tidak dapat ditemukan pengaturan atau jaminannya di dalam Konstitusi Jepang sebagaimana halnya yang terjadi di Thailand melalui Konstitusi Thailand Tahun 1997. Khusus untuk kejaksaan di Jepang, independensinya dijamin melalui Public Prosecutors Office Law. Salah satu wujud dari jaminan itu dimuat dalam pasal 25 *japan criminal procedure code* yang menjelaskan bahwa pejabat kejaksaan yang sedang melaksanakan tugas tidak bisa dipecat atau ditangguhkan wewenangnya berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya itu.

Jaminan independensi tersebut di atas menjadi penting untuk menghindari intervensi eksekutif terhadap pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan, mengingat secara struktural, fungsi penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan adalah termasuk dalam bagian kekuasaan eksekutif yang dikepalai oleh perdana menteri. Di sisi lain, Menteri Kehakiman Jepang masih memiliki wewenang untuk mengawasi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, tetapi wewenang itu tetaplah dibatasi agar independensi kejaksaan tetap dapat diwujudkan. Article 14 dari Public Prosecutors Office Law menjelaskan bahwa “[the] Minister of Justice may control and supervise public prosecutors

generally in regard to their functions...”. Kata “generally” itu sendiri diartikan hanya terbatas pada masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan tugas kejaksaan untuk melakukan penuntutan dalam proses hukum terhadap suatu tindak pidana. Misalnya, dalam hal pembentukan pedoman umum rencana pencegahan kejahatan dan pembentukan pedoman umum agar proses penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa memiliki keseragaman.

Di Jepang dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jepang (*japan criminal procedure code*) seorang jaksa diberi kewenangan eksklusif dalam melakukan penuntutan. Jaksa tidak bisa sewenang-wenang melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana. Jaksa harus mempersiapkan dan mengumpulkan alat bukti atau fakta-fakta yang cukup untuk dapat untuk membuktikan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana dan segera akan dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum (*discretionary* prinsip penuntutan). Di sisi lain seorang jaksa harus mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, hal-hal apa saja yang menjadi sebab tersangka melakukan tindak pidana tersebut dan bagaimana akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Dengan berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut diatas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : **STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) DAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA JEPANG (*JAPAN CRIMINAL PROCEDURE CODE*)**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Dalam penelitian ini perumusan masalah dari masalah-masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Hukum Acara Pidana Jepang (*Japan Criminal Procedure Code*) ?
2. Apakah kelebihan dan kelemahan pengaturan Sistem Penuntutan dalam penuntutan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Hukum Acara Pidana Jepang (*Japan Criminal Procedure Code*) ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan objektif
 - a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Hukum Acara Pidana Jepang (*Japan Criminal Procedure Code*)
 - b. Untuk mengetahui secara jelas mengenai kelebihan dan kelemahan pengaturan Sistem Penuntutan dalam penuntutan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Hukum Acara Pidana Jepang (*Japan Criminal Procedure Code*)

2. Tujuan subjektif

- a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya tentang penuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan acara pidana Jepang.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Hukum Acara Pidana Jepang (*Japan Criminal Procedure Code*)
- b. Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai kelebihan dan kelemahan pengaturan Sistem Penuntutan dalam penuntutan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Hukum Acara Pidana Jepang (*Japan Criminal Procedure Code*)

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti
- b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam hal penuntutan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b) Penelitian terhadap sistematik hukum
- c) Perbandingan hukum
- d) Sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990: 15)

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah perbandingan hukum yang membandingkan antara Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana Menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dan Menurut Hukum Acara Pidana Jepang (*Japan Criminal Procedure Code*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru” (Soerjono Soekanto, 2006:10).

Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan suatu perbandingan tentang Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dan Menurut Hukum Acara Pidana Jepang (*Japan Criminal Procedure Code*)

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Japan Criminal Procedure Code* dan Peraturan perundangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti tulisan-tulisan ilmiah dan sumber tertulis lainnya, buku-buku, literatur, dokumen resmi hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum

normatif, maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yaitu sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 2) *Japan Criminal Procedure Code*
- b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam penelitian ini
 - 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan/terkait dalam penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya : (Soerjono Soekanto, 2001: 13).
 - 1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini
 - 2) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustakan yaitu

pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, karangan ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, perbandingan penuntutan akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui persamaan, perbedaan kelebihan dan kelemahan kewenangan penuntutan yang ada di Indonesia dengan Jepang berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) dan *Japan Criminal Procedure code*.

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkan dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Marzuki, 2006:47). Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim, 2008:249).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perbandingan hukum. Tinjauan umum tentang penuntutan Tinjauan umum Tentang hukum acara pidana Indonesia, Tinjauan umum tentang hukum acara pidana Jepang

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu bagaimana perbandingan tentang penuntutan perkara pidana menurut KUHAP dan menurut hukum acara pidana jepang (japan criminal procedure code)

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka teori

1. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum

a) Istilah dan Definisi Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan: *comparative law* (bahasa Inggris), *vergleichende rechtlehre* (bahasa Belanda), *droit comparé* (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia (Romli Atmasasmita, 2000 : 6).

Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah yang telah dipergunakan untuk hal yang sama di bidang hukum perdata, yaitu perbandingan hukum perdata. Untuk memperoleh bahan yang lebih lengkap, maka perlu dikemukakan definisi perbandingan hukum dari beberapa pakar hukum terkenal.

Romli Atmasasmita dalam bukunya mengutip beberapa pendapat ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain :

- 1) Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum
- 2) Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan

- 3) Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparative law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.
- 4) Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah : Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton
- 5) Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup : (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya
- 6) Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup : “*analysis and comparison of the laws*”. Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum.
- 7) Hesel Yutena mengemukakan definisi perbandingan hukum sebagai berikut: *Comparative law is simply another name for legal science, or like other branches of science it has a universal humanistic outlook ; it contemplates that while the technique nay vary, the problems of justice are basically the same in time and space throughout the world.*(Perbandingan hukum hanya suatu nama lain untuk ilmu hukum dan merupakan bagian yang menyatu dari suatu ilmu sosial, atau seperti cabang ilmu lainnya perbandingan hukum memiliki wawasan yang universal, sekalipun caranya berlainan, masalah keadilan pada dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat di seluruh dunia)
- 8) Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum sebagai berikut : *Comparative law is legal discipline aiming at ascertaining*

similarities and differences and finding out relationship between various legal systems, their essence and style, looking at comparable legal institutions and concepts and trying to determine solutions to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc. (Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain)

- 9) Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan Kötz yaitu : *Comparative law is the comparison of the spirit and style of different legal system or of comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different system.* (Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembagahukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda)
- 10) Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan

b) Perbandingan Hukum Sebagai Metode dan Ilmu

Perbandingan hukum menunjukkan perbedaan antara perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Ketidaktepatan tersebut biasanya dijumpai pada perumusan-perumusan yang bersifat luas, seperti yang dapat ditemui pada "*Black's Law Dictionary*" yang menyatakan bahwa "*comparative jurisprudence*" adalah "*The study of the*

principles of legal science by the comparison of various systems of law" (Henry Campbell Black: 1968).

Akan tetapi perumusan dari Black tersebut sebenarnya cenderung untuk mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai metode, karena yang dimaksudkan dengan "*comparative*" adalah "*Proceeding by the method of comparison; founded on comparison; estimated by comparison*"..

Ilmu-ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya, maka dipergunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum (L. J. van Apeldoorn: 1966). Penggunaan metode-metode tersebut dimaksudkan untuk:

- 1) metode sosiologis : untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya,
- 2) metode sejarah : untuk meneliti tentang perkembangan hukum,
- 3) metode perbandingan hukum : untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari macam-macam masyarakat.

Ketiga metode tersebut saling berkaitan, dan hanya dapat dibedakan (tetapi tak dapat dipisah-pisahkan). Metode sosiologis, misalnya, tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah, oleh karena hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan hasil dari suatu perkembangan (dari zaman dahulu). Metode perbandingan hukum juga tidak boleh diabaikan, oleh karena hukum merupakan gejala dunia. Metode sejarah juga memerlukan bantuan dari metode sosiologis, oleh karena perlu diteliti faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan hukum. Metode perbandingan tidak akan membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif; juga diperlukan data tentang berfungsinya atau efektivitas hukum, sehingga diperlukan metode sosiologis. Juga diperlukan metode sejarah, untuk mengetahui perkembangan dari hukum yang diperbandingkan. Dengan demikian maka

ketiga metode tersebut saling mengisi dalam mengembangkan penelitian hukum (Soerjono Soekanto 1989 : 26).

c) Perbandingan Hukum dan Cabang-Cabangnya

Betapa pentingnya perbandingan hukum dan berkembangnya pengkhususan ini, antara lain terbukti dari kenyataan bahwa kemudian timbul sub-spesialisasi. Sub-spesialisasi tersebut adalah (Edonard Lambert: 1957):

- 1) *Descriptive comparative law*,
- 2) *Comparative history of law*,
- 3) *Comparative legislation* atau *comparative jurisprudence (proper)*.

Descriptive comparative law merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat (atau bagian masyarakat). Cara menyajikan perbandingan dapat didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu (bidang tata hukum) ataupun kaedah-kaedah hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat ditonjolkan adalah analisa deskriptif yang didasarkan pada lembaga-lembaga hukum.

Comparative history of law berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum dan untuk *Comparative legislation* atau *comparative jurisprudence (proper)* bertitik tolak pada (Edouard Lambert: 1957): "... the effort to define the common trunk on which present national doctrines of law are destined to graft themselves as a result both of the development of the study of law as a social science and of the awakening of an international legal consciousness."

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data primer), maupun bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tertier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum primer, antara lain, mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan (misalnya hukum adat) yurisprudensi, traktat, dan

seterusnya. Bahan-bahan hukum sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan (untuk "*comparative history of law*"), hasil karya para sarjana, hasil penelitian, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum tersier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan menjelaskan bahan primer dan sekunder (Soerjono Soekanto 1989 : 54).

2. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

a) Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan [Undang-Undang](#), Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota negara [Indonesia](#) dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara [Republik Indonesia](#), [Kejaksaan Tinggi](#) (berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan [Kejaksaan Negeri](#) (berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

b) Tugas Dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu :

1) Di bidang pidana :

- (a) melakukan penuntutan
- (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- (d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang

(e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara :

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- (a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (b) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- (c) pengawasan peredaran barang cetakan;
- (d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- (e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- (f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

a) Pengertian Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.” Dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim agar terhadap seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana) inisiatifnya adalah pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan.

Sifat perdata dari penuntutan tersebut menyebabkan pula bahwa kerap kali sesuatu tuntutan pidana tidak dilakukan oleh orang yang dirugikan, karena ia takut terhadap pembalasan dendam atau ia tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran dari tuntutan nya, sebab kekurangan

alat-alat pembuktian yang diperlukan. Atas alasan inilah maka pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan peradilan yang baik telah menyerahkan kepada suatu badan Negara. Yang khusus diadakan untuk itu adalah *openbaar ministrie* atau *openbaar aanklager*, yang kita kenal sebagai penuntut umum.

b) Tugas dan wewenang Penuntut Umum

Di dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15 tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- 7) Melakukan penuntutan
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum

9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang

10) Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Dalam hal penuntut umum melakukan prapenuntutan adalah setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengebalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (pasal 138 KUHAP). Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan

4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

a) Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan hukum pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasar pada peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan terciptanya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari

awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*) (Andi Hamzah, 2002:3).

Hukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah hukum yang menyelenggarakan hukum pidana materiil yaitu merupakan sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara untuk melaksanakan hukum pidana atau menjatuhkan pidana. Seperti rumusan Wirdjono Prodjodikoro, bekas Ketua Mahkamah Agung yang dikutip oleh Andi Hamzah, merumuskan bahwa hukum acara pidana adalah Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana (Andi Hamzah, 2002:7).

Yahya Harahap berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasar nilai-nilai yang manusiawi (M. Yahya Harahap, 2002:4).

Definisi mengenai hukum acara pidana lainnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah (2002:6), adalah sebagai berikut:

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran undang-undang pidana :

- 1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran,
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu,
- 3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya,
- 4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah dipeoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut,
- 5) Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib,
- 6) Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut,
- 7) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Definisi-definisi tersebut di atas dikemukakan oleh para ahli hukum, Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak memberikan definisi hukum acara pidana secara implisit.

b) Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

1) Tujuan Hukum Acara Pidana

Pemahaman mengenai tujuan KUHAP dapat dilihat dalam konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi:

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang

masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila”.

Berdasarkan bunyi konsideran tersebut dapat dirumuskan beberapa landasan tujuan KUHAP, yaitu ;

- (a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang lebih dititikberatkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan kewajiban hukum. Yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang kepadanya, serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya.
- (b) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, hal ini sudah barang tentu termuat di dalam KUHAP menurut cara-cara pelaksanaan yang baik, yang menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan, kejujuran dan kewibawaan.
- (c) Tegaknya hukum dan keadilan, hal tersebut hanya dapat tercipta apabila segala aturan hukum yang ada serta keadilan harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta didasarkan atas nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (d) Melindungi harkat dan martabat manusia, hal ini tidak dapat dilepaskan dari suatu kenyataan bahwa semua manusia ciptaan Tuhan dan semua akan kembali kepada-Nya. Tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain, semua mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak-hak asasi yang melekat pada diri tiap manusia. Manusia sebagai hamba Tuhan, juga sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia lain harus ditempatkan pada keluhuran harkat martabatnya. Sebagai mahluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang harkat dan martabat pribadinya, yang harus dihormati oleh orang lain.

(e) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban yaitu kehidupan bersama antara anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah mereka sepakati (M. Yahya Harahap, 2002:58-79).

Tujuan dari hukum acara pidana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2002:8)

Masih menurut Andi Hamzah, bahwa tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya ialah mencari suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Andi Hamzah, 2002:9)

2) Fungsi Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum acara pidana berawal dari tugas mencari dan menemukan kebenaran hukum. Hakekat mencari kebenaran hukum, sebagai tugas awal hukum acara pidana tersebut menjadi landasan dari

tugas berikutnya dalam memberikan suatu putusan hakim dan melaksanakan tugas putusan hakim. Menurut Bambang Poernomo (1988:18) bahwa tugas dan fungsi pokok hukum acara pidana dalam pertumbuhannya meliputi empat tugas pokok, yaitu :

- (a) Mencari dan menemukan kebenaran,
- (b) Mengadakan tindakan penuntutan secara benar dan tepat,
- (c) Memberikan suatu keputusan hakim,
- (d) Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim.

Menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah (2002:9), mengenai fungsi hukum acara pidana, mengemukakan terdapat tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :

- (a) Mencari dan menemukan kebenaran,
- (b) Pemberian keputusan hakim,
- (c) Pelaksanaan putusan.

3) Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, diatur dalam Penjelasan KUHAP butir ke-3 adalah sebagai berikut :

- (a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (asas persamaan di muka hukum)
- (b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (asas perintah tertulis)
- (c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tak bersalah)

- (d) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi (asas pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan)
- (e) Pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak)
- (f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya)
- (g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum (asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan)
- (h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (asas hadirnya terdakwa)
- (i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)
- (j) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (asas pelaksanaan pengawasan putusan)

- (k) Tersangka diberi kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum, menunjukkan bahwa KUHAP telah dianut asas akusator, yaitu tersangka dalam pemeriksaan dipandang sebagai subjek berhadapan-hadapan dengan lain pihak yang memeriksa atau mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya (*asas accusatoir*) (M.Yahya Harahap, 2002:40)

Sedangkan menurut Andi Hamzah (2002:10-22) bahwa asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- (a) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

- (b) Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*).

Sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setiap orang tersangka/terdakwa wajib dianggap tidak bersalah.

- (c) Asas oportunitas

Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.

- (d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Terdapat pengecualian, yaitu mengenai delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (*openbare orde*).

- (e) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

- (f) Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan tersebut diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara,

- (g) Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum,

(h) Asas akusator dan inkisitor (*accusatoir* dan *inquisitoir*)

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHP telah dianut asas akusator.

(i) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi.

Dari asas-asas hukum acara pidana yang dikemukakan oleh kedua penulis diatas, pada dasarnya banyak kesamaannya, yaitu antara lain: asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas akusator, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas praduga tak bersalah, asas mendapatkan bantuan hukum, dan asas perlakuan sama di depan hakim.

5. Tinjauan Umum Tentang *Japan Criminal Procedure Code*

a) Sejarah

Pada tahun 1868 di Shogun pemerintahan dikembalikan kepada Kaisar. Ketika Pemerintah Meiji mulai memodernisasi Jepang, perubahan revolusioner tentang di bidang peradilan pidana. Prosedur seperti memberikan penilaian hanya pada pengakuan dosa itu dihapuskan, dan penyiksaan dilarang. Sistem peradilan secara keseluruhan mulai mendekati pendekatan Barat. Pada tahun 1880 diberlakukan Pemerintah Chizaiho, model di Perancis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didirikan oleh Napoleon. Pada 1890 Chizaiho direvisi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan beberapa perubahan, yang pertama gaya Barat komprehensif mengadopsi sistem peradilan pidana di Jepang. Pada tahun 1922 baru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan di bawah pengaruh hukum Jerman. Dapat dikatakan bahwa sistem prosedur pidana mengikuti periode Meiji sepenuhnya didasarkan pada sistem Eropa kontinental.

Sekarang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diundangkan pada tahun 1948 sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi pascaperang yang baru, yang menjamin sepenuhnya hak asasi manusia. Sementara Kode ini masih mempertahankan karakteristik dari sistem hukum Eropa kontinental hingga batas tertentu, hal itu telah mengadopsi fitur terbaik dari hukum Anglo-Amerika. Di antara yang paling penting di antaranya persyaratan ketat waran peradilan wajib tindakan investigasi, pembatasan diterimanya bukti, seperti desas-desus, dan adopsi dari sistem musuh pada tahap persidangan. Oleh karena itu, sekarang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat digambarkan sebagai hibrida dari Eropa kontinental dan Anglo-Amerika sistem hukum.

Sebagai hasil dari serangkaian reformasi struktural pada akhir abad ke-20, fungsi sistem peradilan telah ditingkatkan dengan cepat, lebih user-friendly dan proses hukum dapat diandalkan untuk rakyat. Di bidang peradilan pidana, acara pidana telah diubah untuk memperkuat dan mempercepat perkara tindak pidana dan untuk memperluas sistem pertahanan publik. Selain itu, dalam sistem telah diberlakukan sejak 21 Mei 2009, yang memungkinkan anggota masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam proses untuk mencoba dan menilai kasus-kasus pidana. Sistem peradilan pidana dari Jepang adalah dalam periode perubahan seperti berusaha untuk memenuhi tuntutan abad ke-21.

b) Penuntutan

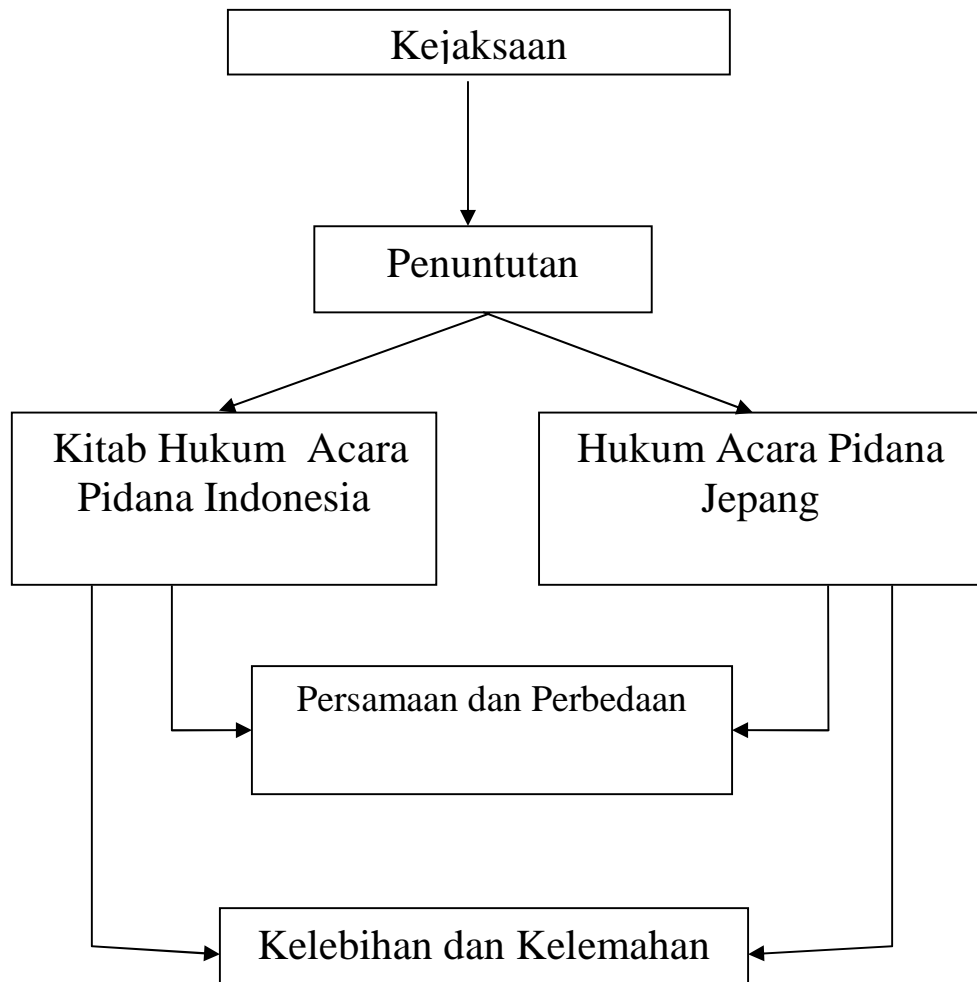
Seorang jaksa di Jepang diberi kewenangan eksklusif dalam melakukan penuntutan. Jaksa tidak bisa sewenang-wenang melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana. Jaksa harus mempersiapkan dan mengumpulkan alat bukti atau fakta-fakta yang cukup untuk dapat untuk membuktikan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana dan segera akan dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum (*discretionary* prinsip penuntutan). Di sisi lain seorang jaksa harus mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, hal-hal

apa saja yang menjadi sebab tersangka melakukan tindak pidana tersebut dan bagaimana akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan

Sehingga polisi harus bekerja keras untuk mencari atau mengumpulkan bukti. Surat perintah juga diperlukan untuk melakukan penangkapan, meskipun kejahatan itu sangat serius atau kemungkinan pelaku melarikan diri, alat bukti dapat diperoleh segera setelah penangkapan. Dalam empat puluh delapan jam setelah menempatkan seorang tersangka dalam penahanan, polisi harus menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa, yang kemudian diperlukan untuk memberitahukan terdakwa dari tuduhan dan hak untuk nasihat. Dalam dua puluh empat jam, jaksa harus pergi sebelum seorang hakim dan menyajikan kasus untuk mendapatkan perintah penahanan. Tersangka dapat ditahan selama sepuluh hari (perpanjangan diberikan di hampir semua kasus bila diminta), sambil menunggu penyelidikan dan keputusan apakah atau tidak untuk menuntut. Tahun 1980-an, beberapa tersangka dilaporkan telah dianiaya selama penahanan ini ke eksak pengakuan. Penahanan ini sering terjadi pada sel-sel di dalam stasiun polisi, yang disebut daiyo kangoku.

Penuntutan dapat ditolak dengan alasan tidak cukup bukti atau pada penilaian jaksa. Di bawah Pasal 248 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setelah menimbang usia pelaku, karakter, dan lingkungan, keadaan dan gravitasi dari kejahatan, dan rehabilitatif terdakwa potensi, tindakan publik tidak perlu dilembagakan, tetapi dapat ditolak atau ditangguhkan dan akhirnya jatuh setelah masa percobaan. Karena penyelidikan dan disposisi kasus dapat terjadi di balik pintu tertutup dan identitas orang tersangka yang tidak dituntut jarang dipublikasikan, pelaku dapat berhasil masuk kembali masyarakat dan direhabilitasi di bawah status percobaan tanpa stigma keyakinan kriminal.

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan. Setiap terjadinya tindak pidana akan segera diproses oleh pihak kepolisian dan akan segera diserahkan kepada kejaksaan untuk segera dilakukan penuntutan. Dalam penyelesaian perkara pidana dalam persidangan di pengadilan harus melewati beberapa tahap, salah satu diantaranya adalah tahap penuntutan. Sebelum melakukan penuntutan terlebih dahulu jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dakwaan tersebut haruslah dibuktikan dengan alat bukti yang ada setelah

itu baru jaksa penuntut umum membuat tuntutan terhadap terdakwa. Dalam hal ini penuntutan merupakan tahap yang paling penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap kasus yang sedang diproses di pengadilan. Dalam penelitian ini akan membandingkan bagaimana proses penuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia dan proses penuntutan yang berlaku di Jepang (Japan Criminal Procedure Code). Setelah dilakukan perbandingan dari masing-masing peraturan, maka dapat diketahui perbedaan, persamaan, dan kelebihan, kekurangan dari masing-masing proses penuntutan yang berlaku di Indonesia dan Jepang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Sistem Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Hukum Acara Pidana Jepang

1. Hasil Penelitian

a) Pengaturan Sistem Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai executive ambtenaar pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

1) Lembaga Penuntutan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan

negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- (a) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- (b) Menuntut Perkara
- (c) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- (d) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Setelah Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta

juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

2) Asas-Asas Penuntutan

- (a) Asas *Legalitas* (*legaliteitsbeginsel*) yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari *asas equality before the law*.
- (b) Asas *Oporunitas* (*opportunitiebeginsel*) yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau tidak, terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Di Indonesia penyampingan perkara oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.
- (c) Asas *Accusatoir* yaitu kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subyek dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini

berlainan dengan asas *Inquisitoir*, dimana tersangka dijadikan obyek dalam pemeriksaan pendahuluan.

3) Wewenang Penuntut Umum

Menurut KUHAP ketentuan mengenai batasan penuntutan diatur di dalam Pasal 1 butir 7 yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

(Andi Hamzah, 1996 : 157)

Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum. Di dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP pengertian jaksa dan penuntut umum berbunyi sebagai berikut :

- (a) Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melakukan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (b) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Evi Hartanti, 2005 : 46-47).

Tugas dan Wewenang Penuntut Umum tercantum antara Pasal 1 butir 6b KUHAP dikaitkan dengan Pasal 1 butir 6a KUHAP maka dapat disimpulkan tugas jaksa adalah sebagai berikut :

- (a) Sebagai Penuntut Umum.
 - (1) Melakukan Penuntutan
 - (2) Melaksanakan penetapan pengadilan.
- (b) Melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*eksekutor*).

Di dalam Pasal 13 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan tuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain ini dalam Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004) menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang :

- (a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- (b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- (c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan kepada penyidik.
- (d) Membuat surat dakwaan.
- (e) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- (f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- (g) Melakukan penuntutan.
- (h) Menutup perkara demi kepentingan umum.
- (i) Mengadakan “ tindakan lain “ dalam lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- (j) Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “ tindakan lain “ antara lain ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Dari rumusan Pasal 14 KUHAP diatas, menurut Bambang Waluyo (2000 : 68) secara singkat proses penuntutan dan tuntutan pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

- (a) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan kepada pengadilan yang berwenang.
- (b) Pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (c) Tuntutan pidana.
- (d) Putusan hakim.

Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, maka harus segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila hasil dari penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHAP). Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

Dalam Pasal 140 KUHAP dinyatakan, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya segera membuat surat dakwaan.

Untuk kepentingan penuntutan, KUHAP memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan, antara lain, prapenuntutan, penahanan termasuk memberikan perpanjangan

penahanan kepada penyidik; mengubah status penahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, memberikan penangguhan penahanan dan membuat surat dakwaan. Wewenang untuk melakukan penahanan yang dimiliki oleh penuntut umum pada umumnya sama dengan kewenangan melakukan penahanan yang dimiliki oleh penyidik. Yang membedakan kewenangan ini adalah apabila jangka penahanan, yaitu 20 hari telah berakhir sedangkan pemeriksaan oleh penuntut umum belum selesai, penuntut umum dapat meminta ketua pengadilan negeri memperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 hari.

Wewenang lain dalam rangka melaksanakan penuntutan adalah membuat surat dakwaan. Pada era HIR surat dakwaan disebut sebagai surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Sedangkan dalam KUHAP, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 140 ayat (1), diberi nama "surat dakwaan". Pada masa lalu surat dakwaan lazim disebut *acte van verwijzing*.

4) Proses Penuntutan

Sebelum penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dalam penuntutan haruslah:

- (a) mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.
- (b) setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum membuat surat dakwaan.

Langkah-langkah Melakukan penuntutan:

(a) Kelengkapan berkas

(1) Kelengkapan formal:

- i identitas tersangka

- ii surat izin ketua pengadilan setempat dalam hal dilakukan penggeledahan
- iii surat izin khusus ketua PN setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat
- iv adanya pengaduan dari orang yang berhak melakukan pengaduan dalam tindak pidana aduan
- v pembuatan berita acara pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penggeledahan, dsb.

(2) Kelengkapan material

Yaitu apabila suatu berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, yakni harus memenuhi alat bukti yang diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP sehingga dari hal-hal tersebut di atas bisa disusun surat dakwaan seperti yang diisyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

(b) Pembuatan Surat Dakwaan

Menurut pasal 140 KUHAP, apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat atau akte yang membuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.

Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab yang menjadi dasar memmbuat tuntutan (*requisitoir*), dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. memang pemeriksaaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.

Tujuan utama surat dakwaan adalah untuk menetapkan secara kongkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana pada waktu dan tempat tertentu. Pentingannya surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengetahui setepat-tepatnya dan seteliti-litinya yang didakwakan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembalasannya terhadap dakwaan tersebut.

Pasal 143 ayat 2 KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat formil dan materiil, syarat formil antara lain

- (1) Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum sebagai pembuat surat dakwaan
- (2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Sedangkan syarat materiil yaitu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. apabila syarat materiil tersebut tidak terpenuhi maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan kejaksaan agung Republik Indonesia, pengertian cermat, jelas dan lengkap antara lain :

- (1) Cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat

dibuktikan. misalnya : apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum daluarsa, apakah tindak pidana itu tidak nebis in idem.

- (2) Jelas artinya jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- (3) Lengkap artinya uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum tidak terikat pada pasal-pasal pidana yang dipersangkakan oleh penyidik, ia dapat mengubah atau menambahkan pasal-pasal pidana lain selain yang telah dipersangkakan oleh penyidik. Dengan catatan bahwa pasal-pasal yang diterapkan oleh penuntut umum tersebut pembuktiannya dapat didukung oleh hasil penyidikan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan, dengan tujuan untuk menyempurnakan surat dakwaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan. KUHAP tidak membatasi ruang lingkup perubahan surat dakwaan, hanya membatasi soal waktu saja. Dalam kaitan antara pasal 144 dan pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka materi perubahan surat dakwaan dapat meliputi :

- (1) Perbaikan atau perubahan pada syarat formil dan materiil
- (2) Perubahan pada bentuk atau sistematik dakwaan
- (3) Perubahan pada redaksi surat dakwaan

- (4) Penyempurnaan surat dakwaan dengan hal-hal yang memberatkan hukuman.

Surat dakwaan akan dibacakan penuntut umum pada awal persidangan, pembacaan surat dakwaan berfungsi :

- (1) Secara resmi dalam sidang yang terbuka untuk umum, memberitahukan kepada terdakwa dan majelis hakim tentang perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Maksudnya agar dakwaan dapat dengan mudah dimengerti oleh terdakwa dan terdakwa pun dapat mengambil sikap untuk melakukan pembelaan diri.
- (2) Secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum, penuntut umum memberitahukan kepada majelis hakim, tentang dasar, arah dan lingkup pemeriksaan perkara yang bersangkutan.
- (3) Secara resmi dalam sidang pengadilan, penuntut umum memberitahukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tentang dasar-dasar pembuktian dan tuntutan pidana yang akan dilakukannya.

Mengenai pembatalan surat dakwaan menurut *Nederburgh* ada dua macam yaitu:

- (1) Pembatalan yang formal (*formele nietigheid*)
- (2) Pembatalan yang hakiki (*wezenlijke nietigheid*).

Di sidang pengadilan, hakim harus melakukan pemeriksaan apakah unsur-unsur dari perbuatan tersebut seperti dinyatakan dalam surat dakwaan itu dapat dibuktikan atau tidak. Dalam menguraikan suatu tindak pidana umumnya harus dinyatakan:

- (1) perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
- (2) bagaimana cara ia melakukannya

- (3) upaya-upaya apakah yang telah dipergunakan dalam pelaksanaannya
- (4) terhadap siapakah tindak pidana itu ditujukan secara langsung atau tidak langsung
- (5) bagaimana sifat dan keadaan orang yang telah menjadi korban
- (6) bagaimana sifat dari terdakwa sendiri
- (7) apakah objek dari delik yang bersangkutan.

Pemuatan waktu untuk kepentingan beberapa persoalan yang berhubungan dengan hukum pidana adalah:

- (1) Berlakunya pasal 1 ayat 1 atau ayat 2 KUHP
- (2) Semua hal dalam mana unsur terdakwa atau korban sewaktu melakukan kejahatan tersebut memegang peranan penting.
- (3) Semua hal dimana untuk dapat dipidanya suatu perbuatan disyaratkan bahwa hal tersebut dilakukan dalam waktu perang, misalnya pasal 124, 126, 127 KUHP
- (4) Penentuan adanya *recidive* (pasal 486 s.d. 488 KUHP)
- (5) Penentuan apakah pencurian itu dilakukan pada waktu malam menurut pasal 363.

(c) Pembuatan Tuntutan (*Requisitor*)

Requisitor (surat tuntutan pidana) dalam Pasal 182 ayat (1) KUHP berbeda dengan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (1) KUHP. Surat dakwaan berfungsi mengantarkan perkara pidana di muka pengadilan dengan permintaan agar diperiksa dan diadili, sedangkan surat tuntutan berfungsi sebagai surat tuntutan di muka pengadilan agar terdakwa diputuskan dengan pernyataan bersalah atau tidak.

Surat dakwaan dibuat dalam tingkat tuntutan pada kejaksaan, didasarkan atas pemeriksaan penyidikan pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan sendiri, sedangkan surat

tuntutan dibuat pada proses persidangan di muka pengadilan dengan dasar hal-hal yang terjadi pada pemeriksaan sidang.

Jadi pengertian *requisitor* adalah tuntutan dari penuntut umum, yang dibacakan tuntutannya dalam suatu proses pengadilan pidana apabila pemeriksaan tersebut sudah selesai; artinya terdakwa, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut sudah didengar keterangannya dan diperiksa dan diteliti sebagaimana mestinya. Dalam tuntutan itu, apabila menurut penuntut umum telah terbukti perbuatan-perbuatan seperti yang dituntut terhadap terdakwa, penuntut umum menurut supaya dijatuhi hukuman pidana atau suatu tindakan, dengan menyebut peraturan-peraturan hukum pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa

(Martiman Prodjohamidjojo, 2002 : 106)

Kebenaran bahwa surat dakwaan adalah dasar tuntutan pidana dapat terlihat dalam hal sebagai berikut:

- (1) Dalam surat tuntutan pidana, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa diuraikan kembali sebelum diketengahkan hasil-hasil pemeriksaan sidang dalam tuntutan pidana tersebut.
- (2) Fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain daripada hasil pembuktian penuntut umum atas apa yang telah didakwakannya dalam surat dakwaan yang dibacakannya diawal persidangan.
- (3) Dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti daripada tuntutan pidana, penuntutan umum menguraikan segala fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian mempertemukan fakta-fakta itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya dalam surat dakwaan.
- (4) Dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penuntut umum

secara konkrit telah memperoleh gambaran selengkapnya tentang tindak pidana apa yang telah terbukti, kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya, barang bukti apa saja yang telah diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu, maka penuntut umum menunjuk kembali kepada dakwaannya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti dan yang mana tidak terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi.

- (5) pada saat penuntutan umum meminta hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sekali lagi penuntutan umum menunjukan kepada kualifikasi tindak pidana yang terbukti sesuai dengan dakwaannya.

(Harun M.Husein, 1994:186-187)

Pidana pada hakekatnya adalah penderitaan atau nestapa yang sifatnya tidak menyenangkan, pidana tersebut diberikan atau dijatuhkan oleh badan negara yang mempunyai kekuasaan untuk itu dan dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu, penuntut umum dalam menyusun tuntutan pidana harus memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, antara lain:

- (1) Faktor yang memberatkan:

- i terdakwa sudah pernah dihukum
- ii perbuatan terdakwa sangat tercela
- iii terdakwa telah menikmati hasil
- iv terdakwa mangkir atas dakwaan jaksa, sehingga memperlambat jalannya sidang

- (2) Faktor yang meringankan:

- i terdakwa masih muda

- ii terdakwa belum pernah dihukum
- iii terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- iv terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- v terdakwa menyesali perbuatannya.

(Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1987:37)

Dalam konsideran Surat Edaran No. SE 001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, disebutkan arti pentingnya Pedoman Tuntutan Pidana, yaitu antara lain untuk mewujudkan tuntutan pidana:

- (1) Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat
- (2) Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya
- (3) Menciptakan kesatuan kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan asas bahwa kekuasaan adalah satu dan tidak terpisahkan
- (4) Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan lainnya dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara

Dengan memperhatikan keadaan masing-masing perkara secara kasuistik, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

- (1) Pidana mati
 - i Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati
 - ii Dilakukan dengan cara yang sadis di luar perikemanusiaan
 - iii Dilakukan secara berencana
 - iv Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital

v Tidak ada alasan yang meringankan

(2) Seumur Hidup

- i Perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana mati
- ii Dilakukan dengan sadis
- iii Dilakukan secara berencana
- iv Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital

v Tidak ada alasan yang meringankan

(3) Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana, apabila terdakwa:

- i Residivis
- ii Perbuatan menimbulkan penderitaan bagi korban atau kekerasan
- iii Menimbulkan kerugian materi
- iv Terdapat hal-hal yang meringankan

(4) Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{4}$ dari ancaman pidana yang tidak termasuk dalam butir 1,2,3 tersebut di atas

(5) Tuntutan pidana bersyarat

- i Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita korban
- ii Terdakwa belum cukup umur (Pasal 45 KUHP)
- iii Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa/*expert*
- iv Dalam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan Pasal 14f KUHP

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, jaksa umum harus membuat rencana tuntutan dengan memperhatikan:

(1) Perkara-perkara yang mengendalikannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, rencana tuntutan pidana

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

- (2) Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jenjang dalam butir 1 maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan tuntutan pidana tersebut kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
- (3) Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Agung RI secara berjenjang tersebut dalam butir 1 dan 2, Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
- (4) Rencana Tuntutan Pidana disampaikan dengan menggunakan formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-120/J.A/12.1992

Tuntutan pidana diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan dinyatakan selesai. Selanjutnya terdakwa/penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibaca segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak berkepentingan (Pasal 182 KUHP).

2. Pengaturan Sistem Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Jepang

1) Lembaga Penuntutan

Di Jepang yang menjadi lembaga penuntutan adalah Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga independen yang memiliki kekuatan penuntutan. Melakukan penyelidikan kejahatan,

sebagai lembaga penuntut umum, melaksanakan dengan pendapat, serta mengontrol dan mengawasi pelaksanaan ajudikasi, dan tentang urusan kriminal. Selain itu, kejaksaan terlibat dalam proses administratif yang ditunjuk oleh undang-undang dan tata cara untuk bertindak sebagai wakil untuk melindungi kepentingan publik, seperti menjadi pihak oposisi di suatu tindakan untuk pengakuan seorang anak. Kejaksaan diberi dengan wewenang eksklusif sebagai lembaga penuntutan umum. Pertanyaan tentang apakah akan mendakwa atau tidak diserahkan kepada kebijaksanaan Jaksa Penuntut Umum, dan dapat menahan diri dari tuntutan masyarakat melembagakan bahkan di mana terdapat cukup alasan bahwa fakta-fakta tersebut merupakan sebuah kejahatan (discretionary prinsip penuntutan).

Kejaksaan di Jepang diketuai oleh Jaksa Agung, delapan Tinggi Kantor Jaksa Penuntut Umum dikepalai oleh seorang Jaksa Superintendin), 50 Kabupaten Kantor Jaksa Penuntut Umum dikepalai oleh seorang Kepala Jaksa dan 203 cabang, dan 438 lokal Kantor Jaksa Penuntut Umum terdiri terutama dari Asisten Jaksa Penuntut Umum, yang harus lulus ujian khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehakiman setelah bekerja di badan-badan peradilan pidana untuk jangka waktu tertentu. Seperti tahun 2003, ada sekitar 2.350 jaksa penuntut umum termasuk sekitar 900 asisten jaksa penuntut umum dan sekitar 8.650 pejabat asisten di Jepang. Mengenai ukuran kabupaten kantor jaksa penuntut umum, kantor rata-rata mempunyai sepuluh jaksa penuntut umum. Satu yang terkecil hanya memiliki lima jaksa penuntut umum, dan yang terbesar satu memiliki lebih dari 200 jaksa penuntut umum.

Setiap kantor memiliki Kepala dan Wakil Kepala Jaksa yang mengawasi penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Jadi, misalnya, di kantor kecil, hanya tiga jaksa penuntut umum

sebenarnya

menyelidiki dan menuntut kasus-kasus. Kantor kecil, jaksa penuntut umum yang menyelidiki dan indicts seorang tersangka adalah orang yang sama yang menangani persidangan. Sebaliknya, di kantor-kantor besar, dua jaksa penuntut umum yang berbeda melaksanakan tugas-tugas ini, bekerja baik di Departemen Investigasi (biasanya disebut "Departemen Urusan Kriminal") atau Departemen Ujian.

2) Asas-Asas Penuntutan

Dalam penuntutan di Jepang menganut *asas Oportinitas* yang sangat luas yang artinya “penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat” (*the public prosecution may decide conditionally or unconditionally to take a prosecution to court or not*). Sudah sejak lama Jepang memonopoli penuntutan pidana, Jaksa penuntut umum dapat pula menyidik sendiri, dapat memerintahkan polisi untuk memulai dan menghentikan penyidikan. Dapat mengambil alih penyidikan atau memberi petunjuk kepada polisi, dalam menyidik dapat juga dibantu polisi.

Jaksa Jepang mempraktekan yang disebut penundaan penuntutan jika suatu perkara dipandang penuntutan tidak perlu karena sifat delik, umur, dan lingkungan tersangka, berat dan keadaan delik serta keadaan sesudah delik dilakukan. Dengan praktek itu, maka 50% delik kekayaan (termasuk pencurian) yang dilakukan orang tua (diatas 60 tahun) dikesampingkan oleh penuntut umum. Di Jepang pada umumnya perkara yang dituntut ke pengadilan jarang yang bebas, karena perkara dikirim hanya jika penuntut umum yakin terdakwa akan dipidana dengan bukti-bukti yang cukup. Perkara yang terdakwa dibebaskan hakim hanya 0,001%. (Andi Hamzah, 2001 : 37)

3) Wewenang Penuntut Umum

Di Jepang, jaksa penuntut umum (*kensatsu-kan*) adalah pejabat profesional yang memiliki kekuatan cukup penyidikan, penuntutan, eksekusi pidana pengawasan dan sebagainya. Jaksa dapat langsung melakukan penyelidikan polisi untuk tujuan, dan kadang-kadang menyelidiki secara langsung. Hanya jaksa yang dapat mengadili penjahat pada prinsipnya, dan jaksa dapat memutuskan apakah akan menuntut atau tidak. Pejabat tinggi dari Kementerian Kehakiman sebagian besar jaksa.

Jaksa penuntut umum di Jepang memiliki status yang setara dengan hakim dalam hal kualifikasi dan gaji. Mereka menerima gaji yang sama sesuai dengan panjang masa jabatan mereka. Kemandirian dan ketidakberpihakan juga dilindungi oleh hukum. Mereka dianggap sebagai wakil tidak memihak kepentingan publik. Selain dari proses disiplin, mereka tidak dapat dipecat dari jabatannya, tergantung dari kinerja dari tugas mereka atau mengalami penurunan gaji terhadap mereka. Jaksa Agung, Wakil Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Superintending Tinggi Kantor Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh kabinet dan jaksa penuntut umum lainnya oleh Menteri Kehakiman. Usia pensiun mereka adalah 63 dan 65 untuk Jaksa Agung.

Fungsi kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan eksekutif diberikan dalam Kabinet, dan kabinet bertanggung jawab kepada Diet dalam latihan mereka. Menteri Kehakiman harus mempunyai kekuasaan untuk mengawasi jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan / tanggung jawabnya sebagai anggota kabinet. Namun, fungsi kejaksaan memiliki sifat quasi-yudisial, mau tidak mau mengerahkan pengaruh yang penting pada semua sektor peradilan pidana, termasuk lembaga peradilan dan polisi. Jika fungsi yang dikendalikan oleh pengaruh politik, maka seluruh sistem peradilan pidana akan membahayakan. Menyelaraskan

persyaratan ini, Undang-Undang Kejaksaan Umum Pasal 14 menyatakan bahwa " Menteri Kehakiman dapat mengendalikan dan mengawasi jaksa penuntut umum pada umumnya dalam kaitannya dengan fungsi mereka. Namun, dalam kaitannya dengan penyelidikan dan disposisi individu kasus, ia dapat mengendalikan hanya Jaksa Agung ". Menteri Kehakiman tidak dapat mengendalikan individu jaksa penuntut umum secara langsung.

Jaksa penuntut umum berfungsi melakukan penyidikan, penuntutan melembagakan, meminta penerapan hukum yang tepat oleh pengadilan, mengawasi pelaksanaan penilaian dan hal-hal lain yang jatuh di bawah yurisdiksi mereka. Bila perlu untuk tujuan penyelidikan, mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka di luar yurisdiksi geografis mereka. Jaksa penuntut umum diberi wewenang untuk melakukan penuntutan perkara pidana dan untuk mengarahkan penegakan kriminal. Mereka memiliki jumlah besar kebijaksanaan dalam mengendalikan dan mengarahkan kasus pidana. (Hukum Acara Pidana Jepang, pasal 248). Oleh karena itu, mereka memiliki kekuatan untuk menghentikan penuntutan bahkan ketika mereka dapat membuktikan pelaku melakukan kejahatan. Mereka juga dapat menyelidiki semua kasus kriminal kategori pada inisiatif mereka sendiri, tanpa bantuan dari polisi dan penegak hukum lainnya. Kasus khusus, seperti penyuapan yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah ditempatkan atau perusahaan yang melibatkan kejahatan pelanggaran kepercayaan oleh para eksekutif sering diselidiki oleh jaksa. Meningkatnya frekuensi terjadinya kasus-kasus khusus ini menekankan pentingnya kekuatan investigasi jaksa.

4) Proses Penuntutan

Ketika suatu kejahatan terjadi, polisi melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti yang dicari, perampasan dan inspeksi, dan wawancara para tersangka dan saksi. Kemudian, dalam kasus

tertentu, mereka menangkap seorang tersangka (orang yang dicurigai melakukan kejahatan), melakukan penyelidikan yang diperlukan, dan mengirim kasus tersebut kepada jaksa penuntut umum. Para jaksa penuntut umum juga menginstruksikan polisi untuk melakukan penyelidikan tambahan, atau melakukan sendiri penyelidikan kasus yang dikirim dari polisi. Karena jaksa penuntut umum memiliki wewenang untuk menyelidiki segala macam kejahatan, mereka sering melakukan investigasi mereka sendiri sebelum polisi berkaitan dengan kejahatan seperti evasions pajak, kejahatan intelektual khusus, dan kasus-kasus kriminal yang melibatkan urusan sipil atau komersial, ketika mereka menganggap perlu.

Setelah menyelesaikan penyelidikan, jaksa penuntut umum memeriksa bukti-bukti dan menentukan apakah akan menuntut atau tidak (lembaga penuntutan umum). Penuntutan oleh jaksa penuntut umum mencakup permintaan untuk diadili, di mana dalam sidang terbuka untuk umum akan diselenggarakan di ruang pengadilan, dan meminta agar ringkasan, di mana keputusan dan hukuman (misalnya, denda) yang diberikan sampai dengan pemeriksaan bukti dokumenter tanpa pengadilan. Alasan untuk non-penuntutan termasuk "kecurigaan tidak memadai," di mana bukti itu tidak cukup untuk membuktikan suatu pelanggaran, "penghentian penuntutan," di mana suatu pelanggaran yang dapat dibuktikan tetapi penuntutan dianggap tidak perlu mengingat karakter, usia, atau keadaan dari pelaku, keseriusan dan sifat pelanggaran, dan "kegilaan kriminal," di mana keadaan mental pelaku menghambat kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan salah dan mereka dinilai tidak bertanggung jawab kriminal atas tindakan mereka.

Ketika polisi menangkap seorang tersangka, mereka harus merujuk tersangka ke jaksa penuntut umum bersama-sama dengan

laporan (surat rujukan ke kantor jaksa penuntut umum) dalam waktu 48 jam setelah penangkapan tersangka jika perlu ditahan. Jika tersangka harus ditahan untuk jangka waktu lama, maka jaksa penuntut umum dapat mengajukan permintaan untuk penahanan kepada hakim dalam waktu 24 jam setelah menerima tersangka dari polisi. Periode penahanan sepuluh hari, tetapi jika ada sebab-sebab tidak dapat dihindari, maka jaksa penuntut umum dapat meminta perpanjangan masa penahanan untuk sepuluh hari. Jaksa penuntut umum selaku lembaga penuntutan umum mengajukan surat dakwaan tertulis dengan pengadilan. Ada dua jenis penuntutan umum:

- (a) Permintaan untuk sidang di mana jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk sidang formal (dengan kata lain, proses pengadilan yang ditetapkan oleh KUHAP) yang akan diselenggarakan.
- (b) Permintaan pesanan untuk ringkasan mana meminta jaksa penuntut umum proses yang harus diambil yang memaksakan denda dalam jumlah tertentu atau denda kecil ke Pengadilan Ringkasan, bukannya melembagakan proses pengadilan biasa.

Ketika sebuah permintaan untuk sidang diajukan, pengadilan mengirimkan salinan surat dakwaan tertulis kepada terdakwa dan terdakwa panggilan ke pengadilan pada tanggal persidangan publik pertama. Bila diperlukan, pengadilan menunjuk seorang pejabat pertahanan counsel. Hearing proses terdiri dari prosedur pembukaan, pemeriksaan bukti, argumen penutup, sebuah hukuman. Alur persidangan yaitu :

- (a) Persidangan dimulai dengan prosedur pembukaan. Pengadilan melakukan identifikasi pribadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi identitas terdakwa, dan setelah jaksa penuntut umum telah membaca surat dakwaan tertulis dengan suara keras, pengadilan memberitahukan hak

terdakwa untuk tetap diam. Kemudian, pengadilan memberikan terdakwa kesempatan untuk membuat pernyataan pada kasus penuntutan.

- (b) Persidangan kemudian beralih ke pemeriksaan bukti. Penuntut umum membuat pernyataan pembuka dan memberikan penjelasan tentang fakta dugaan harus dibuktikan dengan alat bukti. Setelah itu, menyimpulkan pemeriksaan bukti, akan membuat rekomendasi tuntutan jaksa penuntut umum mengenai tingkat hukuman.

Pengadilan meminta pendapat dari pertahanan mengenai pemeriksaan alat bukti. Lalu, pengadilan memutuskan apakah akan atau tidak untuk menerima setiap potongan alat bukti menurut ketentuan hukum dan selanjutnya, memeriksa bukti yang telah diterima. Setelah pembentukan seperti fakta-fakta oleh jaksa penuntut umum telah selesai, pembentukan fakta-fakta oleh pertahanan akan dilakukan.

Ketika pemeriksaan bukti telah menyimpulkan, argumentasi penutup terjadi. Dalam proses ini, pertama jaksa penuntut umum memberikan pernyataan penutup dan rekomendasi dari hukuman (suatu pernyataan pendapat mengenai fakta dan penerapan hukum), dan kemudian pertahanan penutup nasihat membuat pernyataan (pernyataan pendapat oleh penasihat hukum). Akhirnya, terdakwa membuat pernyataan final dan menutup sidang.

Dalam hukuman, pengadilan mengucapkan ajudikasi formal (apakah terdakwa bersalah atau tidak, jika terbukti bersalah, ia mengucapkan hukuman) dan alasan untuk itu. Kemudian, jika terdakwa telah diputuskan bersalah, pengadilan akan memberitahu terdakwa hak untuk naik banding.

2. Pembahasan

a) Persamaan dan Perbedaan

1) Persamaan

(1) Lembaga Penuntutan

Di Indonesia lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan adalah Kejaksaan, karena Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), Dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Di Jepang yang menjadi lembaga penuntutan adalah Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga independen yang memiliki kekuatan penuntutan. Melakukan penyelidikan kejahatan, sebagai lembaga penuntut umum, melaksanakan dengar pendapat, serta mengontrol dan mengawasi pelaksanaan adjudikasi, dan tentang urusan kriminal. Kejaksaan diberi dengan wewenang eksklusif sebagai lembaga penuntutan umum.

Berdasarkan pernyataan diatas, lembaga penuntutan yang ada di Indonesia dan Jepang sama-sama di pegang oleh Kejaksaan. Kejaksaan di Indonesia dan Jepang diberi kewenangan eksklusif sebagai lembaga penuntutan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

(b) Asas-Asas Penuntutan

Asas penuntutan di Indonesia dan Jepang sama-sama menganut Asas *Oporunitas (opportunitibeginsel)* yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau tidak, “*the public prosecution may decide conditionally or unconditionally to take a prosecution to court or no*”). terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.

(c) Wewenang Penuntut Umum

Di Indonesia Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam hal ini penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Sedangkan Di Jepang, jaksa penuntut umum (*kensatsu-kan*) adalah pejabat profesional yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan atau tidak terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Sehingga wewenang penuntut umum di Indonesia dan Jepang adalah sama-sama melakukan penuntutan terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.

(d) Proses Penuntutan

Persamaan proses penuntutan di Indonesia dan Jepang dimulai dari pelimpahan perkara ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan juga mengirimkan salinan surat dakwaan kepada terdakwa. Dalam persidangan pertama sebelum jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan hakim menanyakan identitas terdakwa terlebih dahulu setelah itu membacakan surat dakwaan kepada terdakwa, kemudian

terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi, setelah itu pembuktian oleh jaksa penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dibacakan dan selanjutnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa kepada haki, meminta untuk segera diputus.

2) Perbedaan

(a) Lembaga Penuntutan

Di Indonesia Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri berdasarkan pasal 3 dan 4 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

- (1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara republik Indonesia
- (2) Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- (3) Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.

Jaksa agung merupakan pejabat negara, pemimpin dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Di Jepang yang menjadi lembaga penuntutan adalah Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga independen yang memiliki kekuatan penuntutan. Kejaksaan di Jepang diketuai oleh Jaksa Agung, delapan Kantor Tinggi Jaksa Penuntut Umum yang dikepalai oleh seorang Jaksa Superintenden yaitu Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka, Sendai, Sapporo dan Takamatsu. 50 Kantor Kabupaten Jaksa Penuntut Umum yang dikepalai oleh seorang Kepala Jaksa. Selain itu ada 203 cabang, dan 438 Kantor lokal Jaksa Penuntut Umum terutama dari Asisten Jaksa Penuntut Umum. Tingkat yang berbeda dari kantor jaksa penuntut umum sesuai dengan tingkat yang sebanding di pengadilan. Bila perlu untuk tujuan investigasi Jaksa Penuntut Umum dapat menjalankan tugas-tugas di luar yurisdiksi geografis mereka.

(b) Asas-Asas Penuntutan

Asas-asas penuntutan yang berlaku di Indonesia ada 3 yaitu :

- (1) Asas *Legalitas* (*legaliteitsbeginsel*) yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari *asas equality before the law*.
- (2) Asas *Oporunitas* (*opportunitiebeginsel*) yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau tidak, terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Di Indonesia penyimpangan perkara oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.
- (3) Asas *Accusatoir* yaitu kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subyek dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini

berlainan dengan asas Inquisitoir, dimana tersangka dijadikan obyek dalam pemeriksaan pendahuluan.

Penuntutan di Jepang asas yang berlaku hanya *asas Oportinitas* yang sangat luas yang artinya “penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat” (*the public prosecution may decide conditionally or unconditionally to take a prosecution to court or not*).

(c) Wewenang Penuntut Umum

Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan, berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Sedangkan di Jepang, jaksa penuntut umum tidak hanya memiliki kewenangan penuntutan tetapi dapat langsung melakukan penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana baik umum maupun khusus. Jaksa penuntut umum mempunyai kemandirian yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun meskipun kedudukannya tidak tercantum dalam konstitusi. Jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, meminta keterangan saksi, ahli dan atau tersangka yang terkait tindak pidana dan kewenangan tersebut diatur dalam KUHAP Jepang. Selanjutnya bertindak selaku penuntut umum bila perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

(d) Proses Penuntutan

Perbedaan proses penuntutan di Indonesia dan Jepang adalah dalam hal Jaksa penuntut umum selaku lembaga penuntutan umum mengajukan surat dakwaan tertulis dengan pengadilan. Namun di Jepang ada dua jenis penuntutan umum:

- (1) Permintaan untuk sidang di mana jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk sidang formal (dengan kata

lain, proses pengadilan yang ditetapkan oleh KUHAP) yang akan diselenggarakan.

- (2) Permintaan pesanan untuk ringkasan mana meminta jaksa penuntut umum proses yang harus diambil yang memaksakan denda dalam jumlah tertentu atau denda kecil ke Pengadilan Ringkasan, bukannya melembagakan proses pengadilan biasa.

B. Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan Sistem Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Hukum Acara Pidana Jepang

1. Sistem Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

a) Hasil Penelitian

Sistem penuntutan yang dianut menurut Hukum Acara Pidana Indonesia adalah :

1) *Mandatory Prosecutorial System*

Berdasarkan sistem ini, jaksa dalam menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang diluar yang sudah ditentukan (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu)

2) *Discretionary Prosecutorial System*

Pada sistem ini, jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian atau penanganan suatu kasus. Dalam sistem ini jaksa mengambil keputusan, selama mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada juga, mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana, keadaan-keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan, atribut-atribut pribadi dari terdakwa dan korban, tingkat penyesalan perkara terdakwa, tingkat pemaafan dari korban dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik.

b) Pembahasan

1) Kelebihan

Kelebihan yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penuntutan adalah menganut kedua sistem tersebut, masuk dalam Mandatory Prosecutorial System didalam penanganan perkara tindak pidana umum dan masuk juga dalam Discretionary Prosecutorial System di dalam penanganan tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi). Hal ini mengacu kepada pasal 284 ayat 2 KUHAP dan tindak pidana berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu kepada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian sistem yang dianut oleh Kejaksaan RI merupakan perpaduan dari kedua sistem tersebut yang tampaknya tidak dianut oleh kejaksaan di negara-negara lain.

2) Kelemahan

Kelemahan dari sistem penuntutan yang dianut oleh kejaksaan Republik Indonesia adalah dalam hal Mandatory Prosecutorial System karena dalam sistem ini jaksa menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang diluar yang sudah ditentukan. Sehingga jaksa tidak dapat secara langsung menangani suatu kasus tersebut seperti halnya melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan korban dan saksi. Hal tersebut hanya berlaku pada tindak pidana korupsi saja dan tidak berlaku pada tindak pidana umum.

2. Sistem Penuntutan Menurut Hukum Acara pidana Jepang

a) Hasil Penelitian

Sistem penuntutan yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Jepang adalah *Discretionary Prosecutorial System*. Pada sistem ini, jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil

berbagai tindakan dalam penyelesaian atau penanganan suatu kasus. Dalam sistem ini jaksa mengambil keputusan, selama mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada juga, mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana, keadaan-keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan, atribut-atribut pribadi dari terdakwa dan korban, tingkat penyesalan perkara terdakwa, tingkat pemaafan dari korban dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik.

b) Pembahasan

1) Kelebihan

Kelebihan dalam *Discretionary Prosecutorial System* jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dalam menangani suatu perkara, baik dalam hal melakukan penuntutan atau tidak. Karena disini jaksa sangat berperan aktif dalam penanganan perkara dari proses penyidikan sampai proses penuntutan. Jaksa juga mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi tindak pidana tersebut terjadi sehingga menjadi alasan pemaaf bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana.

2) Kelemahan

Kelemahan dari sistem penuntutan yang dianut jepang adalah apabila semua orang melakukan tindak pidana dengan alasan-alasan tertentu yang dapat meringankan atau memaafkan tindakan orang tersebut padahal orang tersebut tau bahwa telah melakukan tindak pidana, maka sistem ini dapat dimanfaatkan sebagian orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Sehingga jaksa harus lebih teliti dan cermat dalam menangani suatu perkara sebelum mengambil keputusan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persamaan kewenangan Kejaksaan di Indonesia dengan Jepang adalah berwenang melakukan penuntutan, lembaga penuntutan yang ada di Indonesia dan Jepang sama-sama di pegang oleh Kejaksaan. Kejaksaan di Indonesia dan Jepang diberi kewenangan eksklusif sebagai lembaga penuntutan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Sedangkan perbedaan kewenangan kejaksaan di Indonesia dan Jepang adalah di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan, berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Sedangkan di Jepang, jaksa penuntut umum tidak hanya memiliki kewenangan penuntutan tetapi dapat langsung melakukan penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana baik umum maupun khusus. Jaksa penuntut umum mempunyai kemandirian yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun meskipun kedudukannya tidak tercantum dalam konstitusi. Jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, meminta keterangan saksi, ahli dan atau tersangka yang terkait tindak pidana dan kewenangan tersebut diatur dalam KUHAP Jepang. Selanjutnya bertindak selaku penuntut umum bila perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.
2. Kelebihan sistem penuntutan yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penuntutan adalah menganut dua sistem yaitu, Mandatory Prosecutorial System didalam penanganan perkara tindak pidana umum dan masuk juga dalam Discretionary Prosecutorial System

di dalam penanganan tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi). Sedangkan kelebihan sistem penuntutan di Jepang menganut sistem *Discretionary Prosecutorial System* dimana jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dalam menangani suatu perkara, baik dalam hal melakukan penuntutan atau tidak. Karena disini jaksa sangat berperan aktif dalam penanganan perkara dari proses penyidikan sampai proses penuntutan. Sedangkan kelemahan dari sistem penuntutan yang dianut oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah dalam hal *Mandatory Prosecutorial System* karena dalam sistem ini jaksa menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang diluar yang sudah ditentukan. Sehingga jaksa tidak dapat secara langsung menangani suatu kasus tersebut seperti halnya melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan korban dan saksi. Sedangkan di Jepang Kelemahan dari sistem penuntutan yang dianut Jepang adalah apabila semua orang melakukan tindak pidana dengan alasan-alasan tertentu yang dapat meringankan atau memaafkan tindakan orang tersebut padahal orang tersebut tau bahwa telah melakukan tindak pidana, maka sistem ini dapat dimanfaatkan sebagian orang tertentu untuk melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara merdeka. Kewenangan kejaksaan di Indonesia harus dilaksanakan secara merdeka dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, namun dalam praktek ketika kejaksaan menangani suatu perkara baik besar maupun kecil masih terpengaruh oleh oleh kekuasaan diatasnya (eksekutif), sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan tidak dapat berjalan secara maksimal.

Kedepannya kekuasaan dan kewenangan kejaksaan dan eksekutif harus dipisahkan secara tegas dan tidak dapat saling mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

2. Kewenangan penuntut umum di Indonesia terhadap perkara tindak pidana umum sebaiknya disamakan dengan kewenangan terhadap perkara tindak pidana khusus, sehingga penuntut umum dapat secara maksimal dalam melakukan penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta. PT Bina Aksara
- Harun M.Husein, 1994. *Surat Dakwaan*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- H.B. Sutopo. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta : UNS Press
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002. *Teori dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta Ghalia Indonesia
- Marwan Effendi. 2005. *Kejaksaan RI dalam Perspektif Hukum dan Implikasinya*. Jakarta. Gramedia
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Perbandingan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1984. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jepang (*Japan Criminal Procedure Code*)

Peraturan Peundang-undangan lainnya yang berkaitan.

Makalah dan Website

Openbaar Ministerie Speech A Prosecution Service must always be a Public Prosecution Service, 16 februari 2006

Hamzah, A. “*Konsep dan Strategi pembaharuan Kejaksaan Republik Indonesia*”. Makalah disampaikan pada *Workshop Governmence Audit of The Public Prosecutor Servive*, Bali 21-22 Februari 2001.

“*Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Makalah diajukan pada seminar menyambut hari bakti adyaksa, Jakarta 20 Juli 2000.

Wikipedia.com

www.google.com

www.hukumonline.com